



**SUARA  
PASURUAN**

■ KREATIF  
■ DINAMIS  
■ ASPIRATIF

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## Bupati Irsyad Yusuf Sampaikan Nota Pengantar Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2024



No image

**Senin, 7 Agustus 2023**

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menyampaikan Nota Pengantar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Penyampaian ini merupakan kewajiban Pemkab Pasuruan berdasarkan Permendagri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan kebijakan

umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024, serta dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Perbup no 12/2023 dan disinkronkan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jatim tahun 2024. Pendapatan daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 3.454.548.548.837 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,73% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023.

Proyeksi pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu, Bupati juga menyampaikan target transfer pemerintah pusat dan antar daerah, serta pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah. Berdasarkan kemampuan keuangan dan pendapatan, jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada 2024 mencapai Rp 3.651.291.784.754,00 triliun, turun 6,68% dibandingkan tahun 2023.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. PAD tahun 2024 diproyeksikan mengalami defisit yang akan ditutupi dari pembiayaan netto. Bupati menekankan bahwa Pemkab Pasuruan akan mengoptimalkan potensi PAD dan penerimaan pajak daerah untuk menutupi kekurangan belanja daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dan PAD dengan cara meningkatkan SDM aparatur

sipil dan menekan kebocoran pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang masih rendah.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*

